



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENI LESTARININGSIH
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 809565

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	5.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PASURUAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m2/77 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	277.000.000
1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, KIJANG INNOVA NEW BORN DIESEL MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA BBS-R M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	93.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	114.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	256.564.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	120.000.000
Sub Total	Rp.	6.111.064.000



III. HUTANG

Rp. 132.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.979.064.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.